Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 3 ; Nomor 2 ; Juli 2025 ; Page 380-385
Doi : https://doi.org/10.59435/gjpm.v3i2.1636
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm

E-ISSN : 3024-8019

Magang Mahasiswa Dan Optimalisasi Layanan Kesejahteraan Masyarakat

Nur Ayda[1], Haidi Hajar Widagdo[2]

[1]Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya
[2]Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya
[1]ayda240804@gmail.com, [2]haidihajarw@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Artikel ini menyoroti peran strategis magang mahasiswa dalam mendukung peningkatan layanan kesejahteraan masyarakat melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Mahasiswa berperan sebagai pelaksana sekaligus agen perubahan sosial yang mendorong efisiensi birokrasi dan memperkuat pelayanan publik. Meski berdampak positif, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kompetensi, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan kurangnya sistem evaluasi. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah diperlukan melalui perencanaan program yang terarah, integrasi kurikulum, dan evaluasi berkelanjutan agar magang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Magang mahasiswa, MBKM, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Mahasiswa memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan sosial, khususnya dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk keterlibatan, seperti memberikan edukasi, melakukan pendampingan, hingga terjun langsung dalam aktivitas pelayanan kesehatan (Mardikaningsih et al., 2021). Nisa et al. (2023) menggarisbawahi bahwa kontribusi mahasiswa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Keterlibatan ini juga sejalan dengan amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pada aspek pengabdian kepada masyarakat (Angelina et al., 2023). Lebih lanjut, Faramedina et al. (2023) menyebutkan bahwa pengabdian masyarakat oleh mahasiswa tidak hanya berdampak positif bagi penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi terhadap proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa itu sendiri. Fitria et al. (2023) menilai bahwa melalui program semacam ini, mahasiswa didorong untuk memiliki kepekaan sosial terhadap kondisi kesehatan di lingkungannya. Sementara itu, Shidiq et al. (2024) menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa secara langsung dalam upaya membangun kesehatan masyarakat. Ummah et al. (2024) menambahkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat mampu menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara dunia akademik dan komunitas(Ummah 2019).

Selain itu mahasiswa juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi. Peran ini diwujudkan melalui upaya membangun kapasitas dan potensi masyarakat, antara lain dengan memberikan motivasi serta mendorong kesadaran akan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada dalam kehidupan sehari-hari secara lebih optimal. Keterlibatan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan ekonomi ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan program Kuliah Kerja Sosial (KKS), sebagaimana dijelaskan oleh Anwar et al. (2017).(Ilham et al. 2024)

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti magang atau praktik kerja sebagai salah satu bentuk pembelajaran di luar kampus. Melalui program ini, mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengekspresikan ide, berinovasi, dan mengembangkan diri tanpa tekanan, sehingga proses belajar menjadi lebih dinamis dan mendalam. Aktivitas tersebut tidak hanya memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperkuat berbagai kompetensi yang dimiliki mahasiswa. Selain itu, magang juga dianggap sebagai sarana strategis untuk membangun relasi profesional dan membuka akses ke dunia kerja. Tujuan utama dari program ini adalah mempersiapkan mahasiswa agar terbiasa dengan ritme dan tuntutan dunia industri. Lebih jauh lagi, pengalaman magang membantu mahasiswa memahami secara langsung hubungan antara teori akademik dan praktik nyata di lapangan, sehingga mereka lebih siap dan terarah dalam menghadapi masa depan (Pratiwi, Rorong, and Rares 2023)

Pelayanan publik mencakup berbagai bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam konteks pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh warganya. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan dan tindakan nyata. Sayangnya, dalam praktiknya, masih ada oknum di lingkungan pemerintahan yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada menjalankan tugas pelayanan. Tindakan yang tidak adil seperti ketidakjujuran

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

dan praktik nepotisme memberikan perlakuan istimewa kepada kerabat atau teman masih kerap terjadi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun semakin menurun(Harahap 2024).

Adapun persoalan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang berujung pada masalah hukum, bahkan melibatkan kepala daerah dan pihak pengelola. Situasi serupa juga dialami oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, yang menerima banyak sekali pengajuan proposal hibah dan bantuan sosial dari berbagai pihak. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan organisasi kemasyarakatan di daerah tersebut, jumlah permohonan dukungan dana untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pun ikut meningkat. Di samping itu, terdapat pula indikasi bahwa hibah dan bantuan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang semakin memperumit pengelolaannya.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam peran strategis mahasiswa dalam program magang MBKM, terutama dalam upaya optimalisasi layanan kesejahteraan masyarakat. Data yang dianalisis berasal dari sumber-sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya.

Analisis dilakukan melalui metode content analysis, dengan menelaah narasi, temuan, dan argumen dari literatur yang relevan untuk memahami keterkaitan antara pengalaman magang mahasiswa dan kontribusinya terhadap pelayanan publik, pengembangan kapasitas individu, serta pemberdayaan masyarakat.

Studi kasus dipilih untuk memperkuat konteks empiris, seperti implementasi program magang di Kota Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Parepare. Pendekatan ini memberikan gambaran konkret mengenai pelaksanaan, tantangan, serta hasil yang dicapai. Data dikumpulkan melalui dokumentasi publikasi resmi dan dievaluasi menggunakan teknik triangulasi sumber guna menjamin validitas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Strategis Mahasiswa dalam Magang dan Layanan Kesejahteraan Masyarakat

Magang mahasiswa, khususnya yang dirancang sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini terlihat dari tiga dimensi utama: penguatan layanan publik, pengembangan kapasitas mahasiswa, dan pemberdayaan komunitas lokal.

1. Penguatan Layanan Publik

Penerapan kebijakan strategis dalam memperkuat pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha melalui pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi merupakan langkah krusial dalam upaya modernisasi tata kelola pemerintahan di Kota Lhokseumawe. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengoptimalkan penggunaan teknologi demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi agar setiap proses dalam pelayanan publik dan sistem perizinan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Melalui magang dan KKN, mahasiswa berkontribusi secara langsung dalam peningkatan efektivitas layanan publik. Penelitian Sitompul et al. (2024) menemukan bahwa intervensi mahasiswa sebagai expert trainee di Desa Bangun Sari Baru, Kabupaten Deli Serdang, mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Mahasiswa terlibat aktif mulai dari analisis kebutuhan desa, perumusan strategi, hingga implementasi layanan berbasis partisipasi masyarakat, yang secara nyata meningkatkan partisipasi warga setempat(Yuliana 2021).

Di tingkat pemerintahan yang lebih formal, program magang di Kejaksaan Negeri Parepare memperlihatkan hasil serupa. Hasil evaluasi menunjukkan mahasiswa berhasil mempercepat proses digitalisasi arsip, menyusun laporan elektronik, dan membantu administrasi. Peningkatan ini memperkuat pengoperasian institusi publik serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat(Penguatan et al. 2025)

2. Pengembangan Soft Skills dan Profesionalisme Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti magang memperoleh pengalaman langsung di lapangan yang meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis (soft skills). Pratiwi, Rorong, & Rares (2023) menegaskan bahwa implementasi MBKM magang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa, termasuk kemampuan komunikasi, analisis, dan motivasi diri. Data kuantitatif yang diperoleh melalui regresi linear sederhana menunjukkan korelasi positif kuat antara kualitas pelaksanaan program magang dan meningkatnya kompetensi mahasiswa(Pratiwi, Rorong, and Rares 2023)

Pelatihan soft skills bagi mahasiswa menjadi kebutuhan yang penting dalam membekali mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kegiatan organisasi, terutama dalam hal kepemimpinan, pengelolaan diri, manajemen waktu, dan kerja tim. Keterampilan lunak ini tidak hanya relevan dalam lingkungan organisasi kemahasiswaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam dunia profesional, di mana kemampuan tersebut sering kali menjadi penentu keberhasilan karier. Melalui pelatihan ini, mahasiswa diharapkan mampu menggali potensi diri dan memperkuat keterampilan interpersonal mereka, sehingga lebih siap dalam memimpin, menjalankan organisasi secara efektif, serta menyesuaikan diri dengan dinamika dunia kerja yang terus berubah(Ramadhania et al. 2024).

Lebih jauh, model magang berbasis community development juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis. Sebagai contoh, apliaksi metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam MBKM

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

memungkinkan mahasiswa untuk berperan sebagai fasilitator dalam proses partisipatif masyarakat, meningkatkan empati, kreativitas, serta kemampuan problem solving mereka (Alifa et al. 2023).

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal

Model magang yang berbasis komunitas memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Sitompul et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif oleh mahasiswa dalam pengelolaan pelayanan publik berhasil meningkatkan rasa memilki dan keterlibatan warga desa terhadap layanan tersebut. Keterlibatan ini membuat program lebih relevan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Lebih jauh, metode PRA dalam KKN memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi bersama, sehingga program-program yang dijalankan menjadi lebih kontekstual dan berdampak positif terhadap kesejahteraan desa(Yuliana 2021)

b. Kontribusi Mahasiswa dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Program magang mahasiswa, terutama yang berfokus pada pengabdian masyarakat dan pelayanan publik, dipandang sebagai langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten sekaligus memberi dampak positif bagi kesejahteraan sosial. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi aspek struktural, budaya, hingga administrasi, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi.

1. Minimnya Kolaborasi Antarinstansi

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan institusi tempat mahasiswa melakukan magang. Banyak kegiatan magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan tanpa melalui pemetaan kebutuhan riil di lapangan. Alhasil, kemampuan yang dimiliki mahasiswa tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lembaga tujuan. Ketidaksesuaian ini menyulitkan mahasiswa untuk beradaptasi dan memberikan kontribusi yang maksimal (Rahayu & Junaidi, 2022). Ketimpangan tersebut juga dapat menurunkan semangat mahasiswa, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan dampak dari program tersebut (Wasitohadi 2016).

2. Birokrasi Rumit dan Minimnya Transparansi

Birokrasi di Indonesia kerap menjadi sorotan dalam opini publik dan seolah tak pernah kehilangan daya tarik untuk dibahas. Hal ini tak lepas dari masih banyaknya permasalahan dalam sistem birokrasi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi birokrasi yang belum ideal menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa ini. Keluhan mengenai rendahnya kualitas pelayanan publik serta kurangnya kompetensi aparatur pemerintah terus bermunculan, tanpa solusi yang benar-benar efektif. Berbagai praktik tidak etis seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, ditambah dengan sistem birokrasi yang tidak efisien, menjadi penghalang utama dalam membangun birokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Masalah-masalah tersebut bahkan telah mengakar dan diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk pola patologi birokrasi yang sulit dihapuskan (Kairupan 2018).

Proses administratif yang berbelit-belit sering memperlambat pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini diperburuk oleh minimnya transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial dan hibah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Studi oleh Safitri et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan hibah di beberapa daerah rawan terjadi penyimpangan karena lemahnya pengawasan serta ketidakterbukaan dalam mekanisme distribusinya.

Di Kota Palangka Raya, sebagai studi kasus, banyak proposal pengajuan hibah diajukan oleh organisasi kemasyarakatan tanpa sistem seleksi yang ketat dan berbasis kebutuhan nyata. Mahasiswa yang terlibat dalam pendampingan program-program ini kerap menghadapi dilema etika, terutama ketika mendapati adanya indikasi praktik nepotisme dan politisasi bantuan sosial (Harahap 2024). Situasi ini menjadikan mahasiswa tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga saksi terhadap kompleksitas birokrasi yang terjadi.

3. Beban Etika bagi Mahasiswa

Saat mahasiswa menghadapi praktik penyimpangan administratif dan pelanggaran etika di lapangan, mereka dituntut untuk mampu bersikap kritis tanpa meninggalkan sikap profesional. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat mereka masih berada dalam tahap belajar dan proses penyesuaian dengan dunia kerja. Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya budaya transparansi, integritas, dan keadilan sosial. Namun, semangat idealisme tersebut kerap kali bertabrakan dengan realitas kepentingan struktural yang sulit dihadapi secara individual(Renofa Bernadeth Pasaribu et al. 2024)

4. Kebutuhan Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Baik

Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi berbasis data menjadi kendala tambahan. Banyak program magang tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas, baik dari sisi pengembangan kapasitas mahasiswa maupun dampak pada masyarakat. Sebagai akibatnya, sulit dilakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Penelitian oleh Wardani & Kurniawan (2023) menegaskan pentingnya merancang sistem evaluasi terpadu yang melibatkan mahasiswa, dosen pembimbing, dan mitra instansi secara aktif (Sangkay and Sangkay, n.d.).

c. Tantangan dalam Implementasi dan Pengelolaan Program Magang Mahasiswa

Program magang mahasiswa merupakan bagian penting dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang bertujuan menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan nyata di lapangan. Meskipun program ini memiliki potensi besar dalam mendorong keterlibatan mahasiswa dalam sektor pelayanan publik dan peningkatan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

kesejahteraan sosial, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensi.

1. **Kesenjangan antara Kompetensi Mahasiswa dan Kebutuhan Lembaga Mitra**

   Salah satu persoalan utama yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keahlian yang dimiliki mahasiswa dengan kebutuhan dari lembaga tempat mereka magang. Tidak jarang mahasiswa ditempatkan tanpa dibekali uraian tugas yang jelas atau pelatihan pendahuluan yang memadai, sehingga peran mereka selama magang cenderung pasif dan tidak terarah. Hasil studi yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2022) mengungkapkan bahwa sekitar 38% mahasiswa merasa tidak memperoleh panduan kerja yang spesifik selama magang, dan hanya 24% yang menyatakan bahwa tugas yang diberikan sesuai dengan latar belakang akademik mereka(Nurhayati and Novitasari 2021).

2. **Kompleksitas Birokrasi dan Minimnya Sistem yang Terintegrasi**

   Hambatan birokrasi juga menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program magang. Banyak lembaga yang menerima mahasiswa magang belum memiliki prosedur penerimaan yang baku dan terstruktur, sehingga proses seleksi dan penempatan sering kali berjalan tanpa transparansi. Kondisi ini semakin rumit dalam konteks kegiatan pengabdian masyarakat, di mana pelaksanaan program kerap berkaitan langsung dengan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang rawan disalahgunakan. Studi oleh Harahap (2024) menyoroti bahwa praktik nepotisme dan politisasi dalam penyaluran dana sosial di sejumlah pemerintah daerah turut memperburuk persepsi masyarakat terhadap layanan publik. Mahasiswa magang yang terlibat dalam proses administratif tersebut tidak jarang menjadi saksi langsung atas ketidakwajaran itu, bahkan merasakan dampaknya secara etis maupun profesional (Supriatna 2021).

d. Penguatan Sinergi Akademik dan Pemerintah Daerah

Keberhasilan pelaksanaan program magang dan kegiatan pengabdian mahasiswa sangat ditentukan oleh kualitas kemitraan antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan strategis yang komprehensif serta mekanisme evaluasi yang konsisten untuk menjamin efektivitas program. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa magang tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan kurikulum, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penguatan sinergi ini bisa diwujudkan melalui integrasi kurikulum yang berbasis proyek sosial, analisis kebutuhan masyarakat secara lokal, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang didukung oleh data. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa berperan tidak hanya sebagai peserta pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam membangun sistem pelayanan sosial yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1. **Pentingnya Kolaborasi Sistemik dan Terencana**

   Untuk menciptakan program magang yang berdampak nyata, sinergi ini harus dimulai sejak tahap perencanaan. Perguruan tinggi sebaiknya menyusun kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga berbasis pada kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini dikenal dengan nama curriculum-community alignment, yakni penyelarasan antara kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Menurut Purwanti & Santosa (2022), pendekatan ini telah terbukti meningkatkan efektivitas kegiatan pengabdian karena mahasiswa mampu menerapkan keilmuan mereka secara kontekstual. Pemerintah daerah pun mendapat manfaat berupa kontribusi langsung dari akademisi muda dalam penyelesaian masalah publik (Ifada, Toyib, and Marhamah 2024).

2. **Integrasi Kurikulum Berbasis Proyek Sosial**

   Salah satu wujud nyata dari kolaborasi yang efektif antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah adalah penerapan kurikulum berbasis proyek sosial (project-based learning) yang selaras dengan program pembangunan lokal. Dalam pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga dilibatkan langsung sebagai agen perubahan di masyarakat. Ketika mereka ditempatkan pada kegiatan yang sesuai dengan keahlian mereka—seperti pendampingan usaha mikro, edukasi kesehatan masyarakat, atau pengembangan layanan publik berbasis digital—mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman praktis, tetapi juga turut mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah (Adolph 2016).

   Studi oleh Handayani et al. (2023) menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek sosial mampu meningkatkan semangat belajar mahasiswa sekaligus memperluas cakupan layanan publik, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga profesional.

KESIMPULAN

Program magang mahasiswa, terutama dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta kegiatan pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pelayanan sosial. Keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan publik turut mendorong transformasi birokrasi menuju arah yang lebih modern, sekaligus meningkatkan kapasitas individu dan kolektif dalam masyarakat lokal. Melalui pendekatan yang partisipatif, mahasiswa menjadi penghubung antara teori akademik dan dinamika lapangan, menjadikan mereka agen strategis dalam pembangunan yang berpusat pada komunitas.

Lebih dari sekadar pengalaman praktis, program magang juga menjadi media pembelajaran untuk pengembangan keterampilan mahasiswa secara menyeluruh—baik kemampuan teknis maupun soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi efektif, hingga pemecahan masalah. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari lemahnya koordinasi antar-lembaga, birokrasi yang berbelit, hingga belum tersedianya sistem evaluasi yang menyeluruh dan terintegrasi. Mahasiswa pun tidak jarang harus berhadapan dengan dilema etis ketika menyaksikan langsung praktik-praktik maladministrasi dan nepotisme dalam penyelenggaraan layanan publik.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan terstruktur antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah. Ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan lokal, penerapan model pembelajaran berbasis proyek sosial, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Dengan strategi ini, program magang tidak hanya menjadi pelengkap akademik, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang inklusif, tanggap terhadap perubahan, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, mahasiswa diposisikan bukan hanya sebagai peserta pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang sejalan dengan tantangan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran konstruktif, serta dorongan semangat selama penulisan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada instansi pemerintah daerah, khususnya di kantor Biro Kesejahteraan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya, yang telah memberikan kesempatan serta menyediakan data yang sangat membantu, sehingga artikel ini dapat disusun secara menyeluruh. Tak lupa, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa peserta program magang MBKM yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga. Untuk semua pihak lain yang turut berperan namun tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis sangat menghargai segala bentuk bantuan dan kerja sama yang telah diberikan.
Semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat ke depannya.

` DAFTAR PUSTAKA

Adolph, Ralph. 2016. “KURIKULUM DAN PENDIDIKAN BERBASIS PROYEK MENDORONG KREATIVITAS DAN KOLABORASI” 5 (4): 1–23.

Alifa, Nazmi Nur, Ulya Salwa Shabihah, Vina Vitrianty Noor, and Sahadi Humaedi. 2023. “Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Desa Melalui Perspektif Community Development.” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 6 (1): 202. https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.49129.

Harahap, Cece. 2024. “Analisis Teori Pelayanan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.” Ekonodinamika Jurnal Ekonomi Dinamis 6 (1): 21–27.

Ifada, Ayu Irnadianis, Muhamad Toyib, and Siti Marhamah. 2024. “Peningkatan Kemampuan Kolaborasi Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Problem Based Learning Di Sekolah Menengah Pertama.” PTK: Jurnal Tindakan Kelas 4 (2): 447–60. https://doi.org/10.53624/ptk.v4i2.391.

Ilham, Muhammad, Muhammad Syauqi Ramdhani, Yazid Abid, Az Zaky, Aulia Murtadha, Muhammad Najmi Akbar, Satria Putra Ramadhan, Fitria Annisa, Putri Aulia Kirana, and Putri Aisyatun Najwa. 2024. “MELALUI PENYULUHAN DI DESA PANDANSARI Pendahuluan” 02 (02): 119–26.

Kairupan, Josef kurniawan. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.” Teknik Informatika 3 (2): 33–40.

Nurhayati, Nuri, and Dwi Novitasari. 2021. “Analisis Ketidaksesuaian Kompetensi Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang.” Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia 1 (2): 349–61. https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i2.376.

Penguatan, Dari, Pelayanan Publik, Muhammad Farid Wajdi, and Alda Sara. 2025. “Kontribusi Mahasiswa Magang Sebagai Bagian Dari Penguatan Pelayanan Publik Di Kejaksaan Negeri Parepare” 3 (1): 264–69.

Pratiwi, Indah, Arie Junus Rorong, and Joyce Jacinta Rares. 2023. “Pengaruh Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Magang Terhadap Kompetensi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Indah.” Jurnal Administrasi Publik IX (2): 1–16.

Ramadhania, Sherin, Miftahul Abid, Muhammad Suryo, Panotogomo Abi Suroso, and Nia Sastra. 2024. “PELATIHAN PENGEMBANGAN SOFT SKILLS MAHASISWA DALAM MENGHADAPI BERORGANISASI PENDAHULUAN Di Tengah Perkembangan Globalisasi Yang Semakin Cepat , Lulusan Perguruan Tinggi Tidak Hanya Diwajibkan Memiliki Pengetahuan Akademis Dan Keterampilan Teknis (Hard Sk,” 380–88.

Renofa Bernadeth Pasaribu, Ketrin Gresia Nainggolan, Noni Robintang Simbolon, and Refina Betseiba Br Tarigan. 2024. “Etika Mahasiswa Di Lingkungan Pendidikan.” SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 3 (1): 114–20. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3260.

Sangkay, R, and R Sangkay. n.d. “KARYAWAN DI PT . OTOMOTO AUTOCARE WANEA MANADO THE EFFECT OF SUPERVISION AND EVALUATION ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT . Begitu Pentingnya Arti Kinerja , Karena Kelangsungan Hidup Organisasi Atau Perusahaan Sangat Bergantung Pada Kinerja Pegawai Atau Karya” 12 (4): 166–76.

Supriatna, Cahya. 2021. “MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN.”

Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. “OPTIMALISASI PERAN MAHASISWA DALAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CEK KESEHATAN DI KAMPUS UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA.” Sustainability (Switzerland) 11 (1): 1–14.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Wasitohadi, Wasitohadi. 2016. "Kolaborasi Dan Sinergi Antar Lembaga Dalam Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah." Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan 3 (2): 230. https://doi.org/10.24246/j.jk.2016.v3.i2.p230-245.

Yuliana, Efri. 2021. "Optimalisasi Peran Mahasiswa KKN Sebagai Tenaga Ahli Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Optimizing" 1 (1): 44–53.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.